disbud
KABUPATEN BANDUNG

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)





BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 245 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 35)
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 245

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 245 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah tahunan. Renja Perangkat Daerah mencerminkan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) dalam periode satu tahun, yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan terukur.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dibentuk sebagai perangkat daerah baru hasil pemisahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembentukan dinas ini merupakan respon terhadap tuntutan strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan secara lebih spesifik, mendalam, dan berkelanjutan. Dengan mandat tersebut, Dinas Kebudayaan memiliki peran sentral dalam pelestarian warisan budaya, penguatan identitas lokal, pemberdayaan pelaku budaya, serta pengembangan ekosistem budaya yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi seluruh unit pelaksana teknis dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai daerah yang memiliki ketahanan budaya, kecintaan terhadap nilai-nilai lokal, serta daya hidup kebudayaan yang kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d)

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan,

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahahan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
f. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
m. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 35);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 83).

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung;

2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;
4. Menjadi acuan bagi Dinas Kebudayaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4 Sistematika

Secara garis besar, Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, dan keterkaitan antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum
Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kebudayaan.

I.3 Maksud dan Tujuan
Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan.

I.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kebudayaan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Bab ini memuat informasi tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan menganai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini di kemukakan rumusan rencana kerja beserta rancangan pendanaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung pada tahun 2024, berbagai dinamika dan perubahan kebijakan, baik dari sisi internal pemerintahan maupun dari pengaruh eksternal, memberikan dampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Perubahan tersebut turut memengaruhi orientasi kebijakan kelembagaan, terutama pasca pemekaran Dinas Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menuntut penyesuaian pada tingkat program, kegiatan, hingga subkegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan urusan kebudayaan;
b. Dasar hukum pembentukan Dinas Kebudayaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. Penegasan kelembagaan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
d. Prinsip keberlanjutan pembangunan (sustainable development), dengan mempertimbangkan kesinambungan program, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pengalokasian anggaran secara tepat sasaran.

Evaluasi terhadap capaian Renja dan Renstra tahun sebelumnya menjadi pijakan penting dalam menyusun rencana kerja yang lebih realistis dan responsif terhadap tantangan. Melalui evaluasi tersebut, Dinas Kebudayaan dapat mengidentifikasi program atau kegiatan yang berjalan efektif, maupun yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan, baik dari aspek substansi, koordinasi antar-stakeholder, maupun aspek anggaran. Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat dan keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal.

Selain itu, pemisahan kelembagaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dari proses adaptasi organisasi baru yang memerlukan penguatan sumber daya manusia, perumusan kebijakan internal, serta pengembangan sistem kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi baru. Namun, di sisi lain, keberadaan Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri

menjadi peluang untuk fokus secara lebih mendalam dalam urusan pelestarian, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan daerah dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari proses transformatif kelembagaan. Dokumen ini menjadi alat strategis dalam menyusun prioritas pembangunan kebudayaan yang berbasis data, evaluasi, dan aspirasi masyarakat. Ke depan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan budaya yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024, khususnya dalam bidang kebudayaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAKIP DISBUDPAR 2. Persentase aset dalam kondisi baik	78 poin 89%	69.153.474.360	75.55 Point 92.55%	25.771.853.587	74 poin 92.55%		75,55 poin 92.25%			86,54	76 poin 89%	15.941.750.273	0 poin 0%	50.716.633.891		73,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.310.000.000	20%	547.483.950	100%		100%		40%	80,48	100%	194.000.000	40%	792.079.750	40%	60,46
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	450.000.000	4 Dokumen	90.514.400	2 Dokumen	133.301.500	2 Dokumen	132.299.800	50%	64,01	2 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	312.742.200	50%	69,5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	3.957.200		48,4	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.968.000		10,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	48.000.000	2 dokumen	3.501.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	2.682.400		75,05	1 dokumen	4.000.000	2 dokumen	7.002.000		14,59
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	18.000.000	0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			0	1 dokumen	-	1 dokumen	-		0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	4.947.550	1 Dokumen		1 Dokumen			0	1 Dokumen	-	0 Dokumen	2.947.550		16,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	38.000.000	4 Laporan	81.360.000	0 Laporan		0 Laporan			0 Laporan	4 Laporan	6.000.000	0 Laporan	49.360.000		129,89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	690.000.000	4 Laporan	363.161.000	2 Laporan	45.350.000	2 Laporan	44.010.000	50%	95,58	2 Laporan	50.000.000	1 Laporan	415.060.000	50%	60,15

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	41.718.195.000	20%	17.492.451.542	100%		100%		40%	87,84	100%	10.080.859.748	40%	31.093.453.292	40%	74,53
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / Bulan	41.453.195.000	80 Orang / Bulan	17.488.151.542	40 Orang	8.529.868.006	40 Orang	7.415.623.069	100%	87,81	40 Orang	10.076.859.748	38 Orang	31.082.573.292	50%	74,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-								0		-		-		0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-								0		-		-		0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-								0		-		-		0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	15.000.000	1 Laporan	1.720.000	0 Laporan		0 Laporan			#DIV/0!	1 Laporan	1.000.000	0 Laporan	2.720.000		18,13
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	250.000.000	0 Laporan		0 Laporan	3000000	0 Laporan	3000000		#DIV/0!	2 Laporan	3.000.000	0 Laporan	3.000.000		1,2
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	1 Laporan	2.580.000	0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	5.160.000		0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	290.000.000	20%	-	100%		100%		40%	83,04	100%	31.000.000	40%	90.855.000	40%	31,33
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 dokumen	5.000.000	2 dokumen		2 dokumen	1.000.000	2 dokumen		100%	0	2 dokumen	1.000.000	0 dokumen	1.000.000		20
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	285.000.000	12 Laporan	50.518.000	12 Laporan	26230000,00	12 Laporan		100%	84,68	12 Laporan	30.000.000	5 Laporan	89.855.000		31,53
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	131.010.000	20%	132.585.000	100%		100%		40%	1,43	100%	14.089.185	40%	22.234.185	40%	16,97
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Laporan	131.010.000	36 Laporan	132.585.000	12 Laporan	14.089.185	12 Laporan	13.960.000		1,43	12 Laporan	14.089.185	5 Laporan	22.234.185		16,97
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.000.000	20%	42.759.200	100%		100%			#DIV/0!	100%	172.500.000	0%	258.018.400		258,02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-								0		-		-		0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 stel	-	100 stel	42.759.200	0 stel		0 stel			0	0 stel	-	0 stel	85.518.400		0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Pegawai	-	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0	0 Pegawai	-	0 Pegawai	-		0
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Pegawai	-	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0	0 Pegawai	-	0 Pegawai	-		0
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Pegawai	-	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0	0 Pegawai	-	0 Pegawai	-		0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Pegawai	-	0 Pegawai		0 Pegawai		0 Pegawai			0	0 Pegawai	-	0 Pegawai	-		0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	100.000.000	0 Orang		0 Orang	172500000,00	0 Orang	171337000,00		0	68 Orang	172.500.000	0 Orang	172.500.000		172,5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0	0 Orang	-	0 Orang	-		0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.285.000.000	20%	1.497.892.626	100%		100%		40%	84,73	100%	519.511.000	40%	2.094.958.623	40%	91,68
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	150.000.000	3 Paket	309.965.100	2 Paket	50.000.000	1 Paket	49991900,00	40%	77,52	1 Paket	50.000.000	0,5 Paket	346.889.290	40%	231,26

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000.000	3 Paket	602.228.002	2 Paket	92.317.900	2 Paket	91.990.100	40%	84,44	1 Paket	100.000.000	1 Paket	660.605.345	40%	132,12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	2 Paket	90.239.790	1 Paket	33.392.250	1 Paket	32.140.900	40%	100	1 Paket	61.011.000	0,5 Paket	183.389.590	40%	183,39
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	2 Paket	47.879.604	1 Paket	20.000.000	1 Paket	19.930.000	40%	99,84	1 Paket	20.000.000	0,5 Paket	81.087.104	40%	81,09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	405.000.000	2 Paket	122.830.530	1 Paket	75.755.500	1 Paket	69.325.350	40%	93,2	1 Paket	80.000.000	0,5 Paket	228.965.594	40%	56,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	30.000.000	24 Dokumen	11.409.600	12 Dokumen	8.500.000	12 Dokumen	8.299.000	40%	99,17	12 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	21.614.600	40%	72,05
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	2 Paket	96.170.000	1 Paket	23.000.000	1 Paket	22.785.600	40%	78,97	1 Paket	20.000.000	0,5 Paket	112.653.600	40%	45,06
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	250.000.000	24 laporan	58.460.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	46.637.300	40%	75,12	12 laporan	50.000.000	5 laporan	102.580.000	40%	41,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	500.000.000	24 laporan	158.710.000	12 laporan	150.254.500	12 laporan	137.934.799	40%	91,14	12 laporan	130.000.000	5 laporan	357.173.500	40%	71,43
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	550.000.000	20%	520.938.000	100%		100%		100%	185,98	100%	50.000.000	100%	714.430.000	100%	129,9
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	125.000.000	12 Unit	25.900.000	1 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	25.900.000		20,72
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	250.000.000	23 Unit	400.768.000	9 Unit		9 Unit		100%	99,73	9 Unit	50.000.000	9 Unit	499.990.000	100%	200
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	175.000.000	20 Unit	94.270.000	0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	188.540.000		107,74
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.744.269.360	20%		100%		100%		40%	85,1	100%	4.619.790.340	40%	14.468.848.689	40%	69,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.650.000.000	24 Laporan	946.374.833	12 Laporan	570.361.294	12 Laporan	503.962.360	40%	65,75	12 Laporan	650.000.000	5 Laporan	1.675.035.657	40%	45,89
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	17.094.269.360	24Laporan	7.377.936.851	12 Laporan	3.987.685.340	12 Laporan	3.930.722.400	40%	88,01	12 Laporan	3.969.790.340	5 Laporan	12.793.813.032	40%	74,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.125.000.000	20%	932.994.044	100%		100%		40%	85,58	100%	260.000.000	40%	1.181.755.952	40%	55,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	250.000.000	2 Unit	120.243.693	1 Unit	42.330.000	1 Unit	32.673.276	40%	59,57	1 Unit	50.000.000	1 Unit	162.245.974	40%	64,9

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	800.000.000	31 Unit	145.141.000	15 Unit	110.000.000	15 Unit	83.238.604	40%	66,88	15 Unit	110.000.000	11 Unit	236.965.627	40%	29,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-								0		-		-		0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000	70 Unit	143.977.200	53 Unit	70.000.000	53 Unit	69.810.000	40%	97,93	53 Unit	82.000.000	11 Unit	233.297.200	40%	93,32
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	250.000.000	25 Unit	98.895.000	0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	107.895.000		43,16
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		-								0		-		-		0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	575.000.000	3 Unit	424.737.151	1 Unit	18.000.000	1 Unit	18.000.000		98,85	1 Unit	18.000.000	0 Unit	441.352.151		76,76
Kantor dan Bangunan Lainnya																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		-								0		-		-		0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-								0		-		-		0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		-								0		-		-		0
Jumlah 1											0		15.941.750.273		50.716.633.891		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			-								0		4.465.244.300		15.661.509.185		0
KEBUDAYAAN																	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	25%	7.108.124.250	18%	5.176.374.425	18%		18%			76,7	18%	3.440.244.300	9%	8.659.939.265		121,83
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Borang Kebudayaan yang terpelihara	4 Borang	2.475.000.000	4 Borang	2.645.656.875	2 Borang		3 Borang		30%	63,1	3 Borang	2.282.777.400	1 Borang	4.525.534.465	30%	182,85
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	1.825.000.000	4 Objek	2.022.454.000	2 Objek		2 Objek		100%	62,03	3 Objek	2.282.777.400	1 Objek	4.033.087.090		220,99
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 orang	650.000.000	300 orang	623.202.875	50 orang		50 orang		100%	0	0 orang	-	0 orang	492.447.375		75,76
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan	5 Jenis	4.058.124.250	4 Jenis	2.138.917.550	2 Jenis		2 Jenis		50%	93,7	2 Jenis	1.157.466.900	1 Jenis	3.742.604.800	50%	92,22
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	2.262.596.550	2 Objek	592.625.000	2 Objek		2 Objek		100%	89,76	2 Objek	338.705.700	1 Objek	952.125.700	50%	42,08
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	700.000.000	7 Laporan	847.562.600	2 Laporan		2 Laporan		100%	94,12	32 Laporan	818.761.200	18 Laporan	2.100.752.800	50%	300,11
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	1.095.527.700	10 Sertifikat	698.729.950	8 Sertifikat		8 Sertifikat		100%	98,2	0 Sertifikat	-	0 Sertifikat	689.726.300		62,96

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang di Bina	3 Lembaga Adat	575.000.000	1 Lembaga Adat	391.800.000	0 Lembaga Adat		0 Lembaga Adat			0	0 Lembaga Adat	-	0 Lembaga Adat	391.800.000		68,14
Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tembaga adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	425.000.000	0 Objek		0 Objek		0 Objek			0	0 Objek	-	0 Objek	-		0
pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	0 Orang	-	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0	0 Orang	-	0 Orang	-		0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / Difasilitasi	1 Unit	150.000.000	1 Unit	391.800.000	0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	391.800.000		261,2
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	25%	3.455.958.260	5%	3.167.698.970	5%		5%			78,18	5%	275.000.000	0%	3.167.524.670		91,65
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang aktif	40 Lingkung Seni	3.455.958.260	55 Lingkung Seni	3.167.698.970	30 Lingkung Seni		30 Lingkung Seni			78,18	30 Lingkung Seni	275.000.000	0 Lingkung Seni	3.167.524.670		91,65
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	900 Orang	1.575.000.000	1300 Orang	2.125.320.510	200 Orang		200 Orang		100%	92,45	300 Orang	275.000.000	10 Orang	2.384.457.870	10%	151,39
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	500 sertifikat	1.880.958.260	850 sertifikat	1.042.378.460	700 sertifikat		600 sertifikat		90%	70,45	0 sertifikat	-	0 sertifikat	783.066.800		41,63
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	-	0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga			0	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-		0
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	5%	2.605.750.000	1%	774.263.340	0.50%		0.50%			0	0%	-	0%	774.263.300		29,71

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang terkelola	5 Sejarah	2.605.750.000	2 Sejarah	774.263.340	1 Sejarah		1 Sejarah			0	0 Sejarah	-	0 Sejarah	774.263.300		29,71
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	1500 Orang	583.250.000	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0	0 Orang	-	0 Orang	-		0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	10 Unit	1.410.000.000	3 Unit	576.483.340	1 Unit		1 Unit		100%	100	0 Unit	-	0 Unit	576.483.300		40,89
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	5 dokumen	612.500.000	2 dokumen	197.780.000	0 dokumen		0 dokumen			0	0 dokumen	-	0 dokumen	197.780.000		32,29
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	20%	1.450.000.000	3%	2.088.296.000	5%		5%			94,39	5%	750.000.000	0%	3.059.781.950		211,02
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	16%	500.000.000	2%	244.371.000	2%		2%		100%	96,25	2%	170.000.000	2%	576.725.600	100%	115,35
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek	360.000.000	0 Objek	60.000.000	0 Objek		0 Objek			0	0 Objek	-	0 Objek	60.000.000		16,67
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	25 Objek	140.000.000	8 Objek	184.371.000	5 Objek		5 Objek		100%	96,25	5 Objek	170.000.000	5 Objek	516.725.600	100%	369,09
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang sudah dikelola	25 Cagar Budaya	950.000.000	11 Cagar Budaya	1.843.925.000	8 Cagar Budaya		8 Cagar Budaya		100%	94,26	8 Cagar Budaya	580.000.000	3 Cagar Budaya	2.483.056.350		261,37
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	111 Objek diduga cagar budaya	950.000.000	222 Objek	1.843.925.000	111 Objek		111 Objek		20%	94,26	111 Objek	580.000.000	33 Objek	2.483.056.350	20%	261,37
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	100%	2.000.000.000	0%		0%		0%			0	0%	-	0%	-		0
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum sejarah Daerah yang terkelola	1 museum	2.000.000.000	0 museum		0 museum		0 museum			0	0 museum	-	0 museum	-		0
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Pembinaan dan Peningkatan Mutu	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman	0 Orang	-	0 Orang		0 Orang		0 Orang			0	0 Orang	-	0 Orang	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya																
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	500.000.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1.500.000.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			-								#DIV/0!		8.221.530.680		20.080.479.793		0
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Jumlah Desa Wisata yang ditata	5 Desa	15.333.755.000	3 Desa		1 Desa		1 Desa			0	1 Desa	8.221.530.680	0 Desa	20.080.479.793		130,96
	2. Jumlah Destinasi Baru	3 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi				0 Destinasi		0 Destinasi			
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang terkelola	1%	300.000.000	0,50%	269.643.320	0%		0%			0	0%	-	0%	269.643.320		89,88
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	-	0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		0
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi			0	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		0
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	-	1	269.643.320	0		0			0	0	-	0	269.643.320		0
Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen				dokumen		dokumen			
Pengelolaan Kawasan Strategis	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	30%	7.392.000.000	30%	2.809.295.296	30%		30%			152,4	30%	968.531.570	0%	4.401.148.123		59,54

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Perencanaan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Perencanaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.200.000.000	2 dokumen	656.821.000	0 dokumen		0 dokumen			0	0 dokumen	-	0 dokumen	1.313.642.000		109,47
Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Pengembangan Kawasan Strategis	Jumlah kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	-	1 Lokasi	149.391.000	0 Lokasi		0 Lokasi			0	0 Lokasi	-	0 Lokasi	298.782.000		0
Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 unit	5.342.000.000	6 unit	1.853.083.296	4 unit	232.258.925	4 unit	223.763.850	100%	86,1	4 unit	888.531.570	1 unit	2.642.032.123	10%	49,46
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-								0		-		-		0
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan kawasan strategisPariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	700.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	52.670.400	50%	43,28	3 Laporan	80.000.000	1 Laporan	146.692.000	30%	20,96
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	150.000.000	1 Lokasi	-	0 Lokasi		0 Lokasi			0	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-		0
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1%	7.291.755.000	1%	7.680.697.225	1%		1%			90,75	1%	7.252.999.110	0%	15.340.394.450		210,38

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Destinasi	-	0 Destinasi		0 Destinasi		0 Destinasi			0	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-		0
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.250.000.000	9 dokumen	856.673.300	1 dokumen	441.830.000	1 dokumen	430.576.925	100%	98,51	5 dokumen	650.000.000	1 dokumen	1.616.437.552	20%	129,32
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	1.200.000.000	1 Lokasi	98.932.900	0 Lokasi		0 Lokasi			0	0 Lokasi	-	0 Lokasi	98.932.900		8,24
Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	15 Unit	3.406.900.000	20 Unit	5.826.086.325	8 Unit	527.737.585	8 Unit	476.517.577	100%	95,83	8 Unit	6.072.359.210	1 Unit	12.222.124.879	10%	358,75
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	886.420.000	16 Laporan	468.332.900	12 Laporan	258.396.400	12 Laporan	240.749.500		56,77	12 Laporan	420.952.900	3 Laporan	893.149.169		100,76
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Lokasi	548.435.000	4 Lokasi	430.671.800	3 Lokasi	161.326.200	3 Lokasi	149.861.000		83,49	3 Lokasi	109.687.000	1 Lokasi	509.749.950		92,95
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	100%	350.000.000	40%	81.000.000	100%		100%			100%	0%	-	0%	69.293.900		19,8
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	18 Dokumen	350.000.000	21 Dokumen	81.000.000	10 Dokumen		10 Dokumen		100%	82,26	0 Dokumen	-	0 Dokumen	69.293.900		19,8
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten / Kota	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0 Unit	-	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0	0 Unit	-	0 Unit	-		0
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	25%	8.452.200.000	160%	7.542.044.889	5%		5%			94,27	5%	3.479.440.000	0%	12.068.610.334		142,79
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	10 Kegiatan	8.452.200.000	6 Kegiatan	7.542.044.889	2 Kegiatan		2 Kegiatan		50%	94,27	2 Kegiatan	3.479.440.000	1 Kegiatan	12.068.610.334	50%	142,79
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	2.822.500.000	6 Dokumen	1.421.565.000	2 Dokumen	194.500.000	2 Dokumen	194.500.000	100%	99,74	2 Dokumen	274.500.000	1 Dokumen	1.808.434.800	25%	64,07
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Laporan	2.579.700.000	8 Laporan	3.224.099.929	4 Laporan	2.461.460.000	4 Laporan	2.388.381.284	100%	83,84	4 Laporan	1.950.940.000	2 Laporan	6.060.678.929	50%	234,94
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.200.000.000	4 Dokumen	621.680.400	2 Dokumen	265.480.000	2 Dokumen	252.564.780	100%	96,24	2 Dokumen	204.000.000	1 Dokumen	849.535.150	10%	70,79
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	900.000.000	4 Dokumen	2.274.699.560	2 Dokumen	836.939.600	2 Dokumen	836.939.600	100%	96,2	2 Dokumen	950.000.000	1 Dokumen	3.249.961.455	10%	361,11
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen	950.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	99.900.000		0	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	100.000.000		10,53
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	5%	1.000.000.000	0,50%	227.995.000	0%		0%			0	0%	-	0%	227.929.000		22,79

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah creative Hub (simpul ekonomi kreatif) yang terbentuk	2 Hub	450.000.000	1 Hub	197.995.000	0 Hub		0 Hub			0	0 Hub	-	0 Hub	197.995.000		44
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Kreatif Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota	40 unit	450.000.000	31 unit	197.995.000	0 unit		0 unit			#DIV/0 !	0 unit	-	0 unit	197.995.000		44
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jejaring Komunitas Ekraf yang di bina	2 Komunitas	550.000.000	0 Komunitas		0 Komunitas		0 Komunitas			0	0 Komunitas	-	0 Komunitas	29.934.000		5,44
Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Laporan	-	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0 unit	-	0 unit		0 unit		0 unit			0	0 unit	-	0 unit	-		0
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 laporan	-	0 laporan		0 laporan		0 laporan			0	0 laporan	-	0 laporan	-		0
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	550.000.000	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100%	99,78	5 Dokumen	-	5 Dokumen	29.934.000		5,44

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	25%	13.100.228.790	5%	7.685.227.090	5%		5%			94,1	5%	2.793.846.500	0%	11.497.464.017		87,77
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	3500 Orang	11.400.228.790	2000 Orang	7.665.227.090	500 Orang		500 Orang			94,24	500 Orang	2.483.846.500	0 Orang	11.129.693.017		97,63
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	500 orang	1.335.000.000	600 orang	598.750.000	200 orang	1.255.242.759	200 orang	1.241.545.000	50%	78,81	2200 orang	1.117.072.500	1050 orang	2.186.981.500	50%	163,82
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	500 Orang	1.000.000.000	950 Orang	1.500.548.800	800 Orang	966.329.000	800 Orang	916.965.638	55%	106,34	715 Orang	941.774.000	400 Orang	3.032.563.700	55%	303,26
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	1000 Orang	2.204.508.130	2710 Orang	1.641.949.730	1300 Orang		1300 Orang			86,66	0 Orang	-	0 Orang	1.454.584.000		65,98
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400 Orang	925.000.000	0 Orang	-	40 Orang		40 Orang		100%	84,14	0 Orang	-	0 Orang	105.174.000		11,37
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	10 Laporan	2.797.500.000	5 Laporan	1.536.959.900	3 Laporan	340.000.000	3 Laporan	340.000.000	100%	96,94	2 Laporan	425.000.000	1 Laporan	2.259.528.217	50%	80,77
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2700 Orang	3.138.220.660	400 Orang	2.262.018.660	2000 Orang		1900 Orang		90%	91,9	0 Orang	-	0 Orang	2.090.861.600		66,63
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen			0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		0

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022 (N - 3)		Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023 (N-1)						Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (2024)		Perkiraan capaian target Rentra perangkat daerah tahun berjalan sampai (2025)			
						Target Capaian Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (N -2)		Realisasi Capaian Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023 (N - 2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Kinerja sampai pada Triwulan II (sd Mei)		Tingkat Realisasi (%)	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12 (7 + 9 + 11)			
Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan	510 Orang	1.700.000.000	20 Orang	-	20 Orang		20 Orang			49	0 Orang	310.000.000	0 Orang	367.771.000		21,63
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	510 Orang	450.000.000	0 Orang	-	20 Orang		20 Orang		100%	98	0 Orang	-	0 Orang	9.800.000		2,18
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	5 Laporan	210.000.000	0 Laporan		1 Laporan		0 Laporan			0	0 Laporan	-	0 Laporan	-		0
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	400 Orang	1.040.000.000	0 Orang		0 Orang	48371000	0 Orang	47971000	0%	#DIV/0!	100 Orang	310.000.000	20 Orang	357.971.000	10%	34,42

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi program dan kinerja secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada aspek pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Beberapa program strategis telah berjalan dan memberikan dampak langsung terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Namun demikian, dari sisi realisasi keuangan, masih terdapat ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan penyerapan yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan teknis, efisiensi pelaksanaan, serta penguatan koordinasi antar unit pelaksana.
2. Terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Faktor pendorong antara lain adalah meningkatnya dukungan masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal, keterlibatan komunitas budaya dalam kegiatan dinas, serta dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang menguatkan posisi Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana urusan kebudayaan secara mandiri. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga perlu dicermati, seperti terbatasnya anggaran pada beberapa kegiatan prioritas, kurangnya tenaga fungsional budaya yang memadai, serta waktu transisi kelembagaan yang masih dalam tahap penyesuaian.

Evaluasi ini menjadi pelajaran penting dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 agar seluruh potensi dapat dimaksimalkan, hambatan dapat diminimalisasi, dan target kinerja dapat tercapai secara lebih efektif. Perlu upaya perbaikan baik dari sisi perencanaan, manajemen pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, agar setiap program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi kemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung.

Untuk itu, strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi krusial, termasuk peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja, serta perluasan kemitraan dengan komunitas budaya, akademisi, dan sektor swasta. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan ke depan, serta mempercepat terwujudnya pembangunan kebudayaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.2.
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Kinerja

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada staf untuk	Terbatasnya jumlah pegawai pada bidang-bidang teknis kebudayaan.

NO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai target.	
2	Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada staf untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai target.	Masih ada pegawai yang belum memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi baru. Masih rendahnya kualitas laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar evaluasi kinerja.
3	Rapat koordinasi rutin antar bidang dan pimpinan dalam memantau capaian kerja serta memecahkan hambatan yang muncul di lapangan.	Jadwal pelaksanaan kegiatan terkadang tidak konsisten karena keterbatasan waktu dan SDM.
4	Besarnya potensi budaya lokal seperti kesenian tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, dan cagar budaya yang dapat dikembangkan.	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset budaya secara berkelanjutan.
5	Besarnya potensi budaya lokal seperti kesenian tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, dan cagar budaya yang dapat dikembangkan.	Belum optimalnya kurasi dan dokumentasi terhadap ragam kekayaan budaya lokal di Kabupaten Bandung.bandung

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, meskipun terdapat pula kekuatan internal yang mendorong tercapainya target kinerja. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut strategis agar hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi dokumentasi semata, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyusun rencana tindak lanjut yang lebih adaptif dan responsif di masa mendatang.

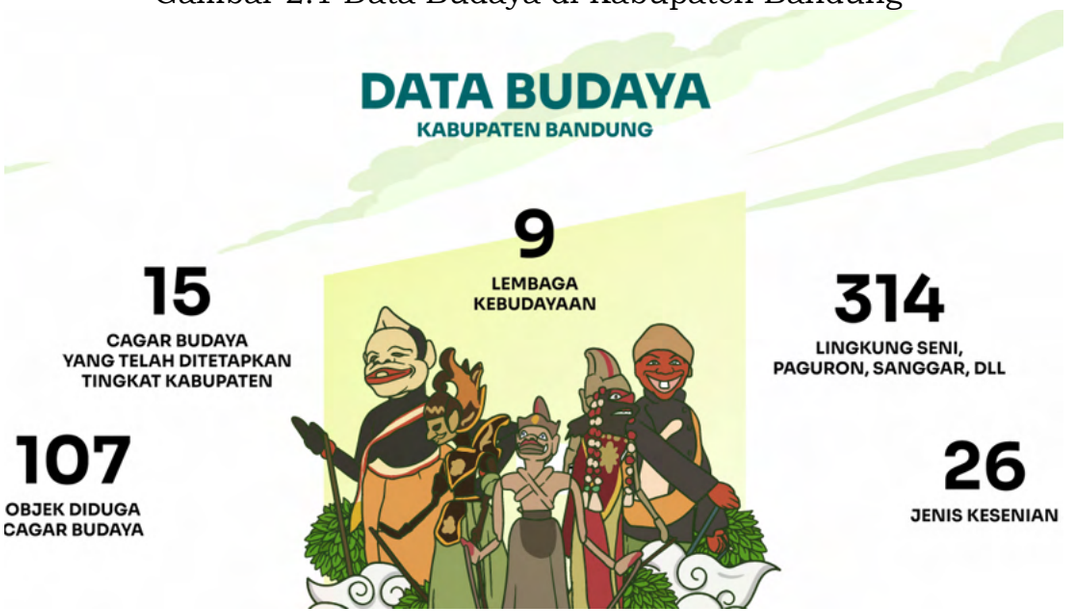
1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah-langkah perencanaan untuk mencapai target kinerja di tahun berikutnya. Evaluasi terhadap faktor pendorong dan penghambat yang telah terjadi selama tahun berjalan menjadi acuan strategis dalam penyesuaian kebijakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan secara lebih tepat sasaran.
2. Kebijakan Kepala Perangkat Daerah agar perencanaan dan penganggaran sejalan dengan tujuan organisasi dilakukan melalui evaluasi rutin dan pemberian arahan kepada seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Langkah ini dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai hambatan yang muncul di lapangan serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif,

adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kebudayaan daerah.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik melalui program pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan mencakup berbagai aspek, antara lain: fasilitasi kegiatan kesenian dan warisan budaya, pelindungan terhadap aset budaya daerah, pembinaan komunitas budaya dan seniman lokal, serta penyediaan akses masyarakat terhadap ruang-ruang ekspresi budaya yang inklusif. Semua bentuk pelayanan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan, memperkuat identitas daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya.

Gambar 2.1 Data Budaya di Kabupaten Bandung



Untuk memastikan pelayanan yang diberikan berjalan optimal, Dinas Kebudayaan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola melalui penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan budaya dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kebudayaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial budaya yang terus berkembang di Kabupaten Bandung.

Selanjutnya Capaian kinerja kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-		50 Poin	51 Poin	52,25 Poin	52,50 Poin	55,09 Poin	56,19 Poin	-	52,50 Poin	Capaian kinerja indikator menunjukan kondisi yang semakin baik untuk memenuhi target akhir jangka menengah
2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	-		18%	27%	27%	27%	27%	55%	-	55%	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

1. Tingkat Kinerja Dinas Kebudayaan

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat daerah berada pada kategori cukup baik hingga baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026. Meskipun Dinas Kebudayaan merupakan perangkat daerah baru hasil pemekaran, namun proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan mempertimbangkan kesinambungan arah kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi indikasi bahwa proses transisi kelembagaan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan program. Justru melalui pemekaran, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya menyatu dalam satu organisasi (dengan sektor pariwisata) kini dapat difokuskan secara lebih spesifik sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan. Hal ini memperkuat pencapaian indikator kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama dalam aspek pelestarian budaya, penguatan kelembagaan seni dan budaya, serta pemberdayaan komunitas budaya lokal.

Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas kinerja ke depan, terutama pada aspek pengendalian dan monitoring. Aktivitas pengendalian internal, termasuk evaluasi berkala atas pencapaian output kegiatan, perlu ditingkatkan baik dari sisi frekuensi maupun ketepatan metode. Selain itu, kesesuaian antara jenis output yang direncanakan dan yang dihasilkan di lapangan juga perlu terus dijaga agar selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dan benar-benar berdampak pada masyarakat serta perkembangan kebudayaan daerah.

2. Permasalahan dan Hambatan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan ini menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program di bidang kebudayaan.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang kebudayaan, seperti tenaga fungsional budaya, kurator, serta pendamping komunitas seni. Selain itu, terbatasnya anggaran pada program pelestarian dan pengembangan budaya menyebabkan beberapa

kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal, terutama yang berkaitan dengan pendokumentasian warisan budaya, revitalisasi seni tradisi, dan pelindungan terhadap cagar budaya.

Hambatan lainnya adalah masih kurangnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan data kebudayaan secara terintegrasi, sehingga menyulitkan proses perencanaan berbasis data. Tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan juga belum merata, disebabkan oleh minimnya akses informasi dan keterbatasan kapasitas komunitas budaya di wilayah tertentu. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah lain maupun pihak eksternal, masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih sinergis dan berdampak luas.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025, agar strategi dan kebijakan yang disusun dapat lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan, serta mampu mendorong akselerasi pembangunan kebudayaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 2.4
Permasalahan Urusan Kebudayaan

URUSAN	MASALAH	KET
KEBUDAYAAN	Belum terbentuknya branding kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai identitas budaya daerah yang khas dan membedakan dari wilayah lain.	
	Belum tersedia peta jalan atau dokumen strategi kebudayaan daerah sebagai rujukan pengembangan kebijakan dan program lintas bidang kebudayaan.	
	Data dan informasi budaya, seperti cagar budaya, tradisi lisan, ekspresi seni, belum terdokumentasikan secara komprehensif dan terintegrasi.	
	Kurangnya tenaga fungsional budaya dan SDM pendukung yang kompeten dalam pengelolaan kebudayaan lokal.	
	Masih minimnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan dalam pembinaan serta pelestarian seni dan budaya daerah.	
	Kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan pelestarian budaya non-benda dan revitalisasi seni tradisi di tingkat lokal.	
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi, edukasi, dan penyebarluasan nilai-nilai budaya di masyarakat.	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program

Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dan misi ke-1 yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak". Maka untuk tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

TUJUAN PEMBANGUNAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing	Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya sunda terhadap pembangunan daerah	Presentase Pemajuan Kebudayaan

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara bijak dan strategis. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program pelestarian budaya secara optimal. Selain itu, kurangnya data kebudayaan yang valid, serta rendahnya literasi budaya di kalangan generasi muda, turut menjadi kendala dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan.

Namun demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal, tumbuhnya komunitas seni dan budaya di berbagai wilayah, serta perkembangan teknologi digital yang dapat dijadikan sarana promosi dan edukasi budaya secara lebih luas. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi kebudayaan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut, Dinas Kebudayaan diharapkan mampu memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat identitas budaya Kabupaten Bandung di tengah arus perubahan zaman.

Tabel 2.6
Tantangan dan Peluang Kinerja

TANTANGAN	PELUANG
Kurangnya SDM fungsional kebudayaan yang kompeten dalam mendampingi kegiatan pelestarian seni, adat, dan budaya lokal.	Tersedianya peluang pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga seni budaya nasional.
Minimnya dokumentasi dan digitalisasi data objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung.	Dukungan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi data budaya secara masif dan mudah diakses oleh publik.
Belum optimalnya pelibatan komunitas budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan.	Semakin aktifnya komunitas budaya dan sanggar seni di berbagai kecamatan yang siap diajak kolaborasi dalam kegiatan kebudayaan.
Terbatasnya anggaran untuk pelestarian budaya non-benda dan revitalisasi tradisi lokal.	Regenerasi Pegawai Disbudpar untuk menutupi kekosongan jabatan Ketersediaan program bantuan pusat dan sponsor swasta untuk kegiatan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan melalui proposal kerja sama.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan cagar budaya dan warisan budaya takbenda.	Momentum pendidikan karakter di sekolah yang dapat diintegrasikan dengan edukasi nilai-nilai budaya lokal
Keterbatasan regulasi teknis daerah yang mendukung perlindungan dan pengembangan budaya lokal secara berkelanjutan.dasar pengambilan kebijakan pimpinan	Dukungan kebijakan pusat melalui UU Pemajuan Kebudayaan, dapat dijadikan dasar untuk penyusunan regulasi turunan di tingkat kabupaten.

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menindaklanjuti isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diuraikan pada tabel sebelumnya, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung merumuskan beberapa strategi utama yang akan dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan kebudayaan, antara lain:

a. Membangun kolaborasi dengan komunitas budaya, seniman lokal, akademisi, dan lembaga adat dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara partisipatif.
b. Menyusun peta jalan pengembangan kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai turunan dari dokumen pokok Pemajuan Kebudayaan dan Renstra Dinas.
c. Melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi objek pemajuan kebudayaan secara berkala untuk memperkuat basis data budaya yang akurat dan terintegrasi.

d. Mengusulkan kebutuhan ASN fungsional kebudayaan ke BKPSDM Kabupaten Bandung, terutama untuk tenaga kurator budaya, penyuluh budaya, dan fasilitator komunitas seni.
e. Melaksanakan digitalisasi arsip dan dokumentasi seni-budaya, termasuk karya maestro lokal, cagar budaya, dan ekspresi budaya tradisional.
f. Melakukan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan HAKI budaya lokal ke Kemenkumham.
g. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
h. Mendorong pelaksanaan kegiatan seni dan budaya berbasis desa atau kelurahan, sebagai bagian dari penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal.
i. Mengembangkan sistem informasi budaya berbasis digital untuk mendukung promosi, edukasi, dan akses publik terhadap kebudayaan Kabupaten Bandung.

II.4 Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Pada bagian ini dilakukan telaahan terhadap kesesuaian antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan pembangunan kebudayaan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang baru hasil pemekaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, memiliki tantangan tersendiri dalam menyusun arah prioritas pembangunan kebudayaan yang lebih fokus dan terukur. Oleh karena itu, keselarasan antara rancangan awal RKPD dan kebutuhan riil lapangan menjadi penting untuk dipastikan sejak tahap awal perencanaan, agar usulan program dan kegiatan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah mengakomodasi kebutuhan dasar pembangunan kebudayaan, seperti pelestarian warisan budaya, penguatan kelembagaan kesenian, hingga fasilitasi ruang ekspresi budaya. Namun demikian, terdapat beberapa usulan spesifik dari Dinas Kebudayaan yang masih perlu diperkuat atau disesuaikan kembali agar lebih sinkron dengan kerangka regulasi dan keterjangkauan anggaran daerah. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISBUDPAR	- Nilai LAKIP DISBUDPAR - Persentase Aset dalam kondisi baik	82 Point 93.25%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISBUDPAR	- Nilai LAKIP DISBUDPAR - Persentase Aset dalam kondisi baik	82 Point 93.25%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	213.876.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	163.876.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	5.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	10.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	10.150.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.243.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	67.093.900
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	2.500.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.600.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	68.025.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	63.920.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.404.169.726	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.404.169.726,00

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISBUDPAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	12.400.169.726	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISBUDPAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	12.400.169.726
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	3.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	11.905.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20.790.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	3.250.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	9.905.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	17.540.000
Administrasi Pendapatan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	30.300.000	Administrasi Pendapatan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	28.525.000,00

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Kewenangan Perangkat Daerah		Kewenangan Perangkat Daerah			Kewenangan Perangkat Daerah		Kewenangan Perangkat Daerah		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	30.300.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	28.525.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	28.525.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	264.890.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	DISBUDPAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	228.800.000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	DISBUDPAR	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	229.890.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISBUDPAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	36.090.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISBUDPAR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Orang	35.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	702.084.513	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	771.689.268,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	184.470.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	185.100.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISBUDPAR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	94.839.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISBUDPAR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	94.839.000

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISBUDPAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	67.585.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISBUDPAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	72.585.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISBUDPAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000
Penyediaan Bahan/Material	DISBUDPAR	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	54.250.000	Penyediaan Bahan/Material	DISBUDPAR	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	54.250.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	66.080.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	66.080.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	94.860.513	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	148.835.268
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISBUDPAR	Prosentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	352.903.614	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISBUDPAR	Prosentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	313.973.859
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBUDPAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	85.129.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBUDPAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	46.199.245
Pengadaan Mebel	DISBUDPAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	36.500.000	Pengadaan Mebel	DISBUDPAR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	36.500.000

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	111.514.614	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	111.514.614
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.977.890.544	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.977.890.544,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	609.278.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	609.278.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.368.612.144	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISBUDPAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.368.612.144
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	661.537.015	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISBUDPAR	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	660.907.015,04

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISBUDPAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISBUDPAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBUDPAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	89.680.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISBUDPAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	89.680.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	114.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	114.500.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	457.357.015,04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	456.727.015,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISBUDPAR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Gedung	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DISBUDPAR	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80.096.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	80.096.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	DISBUDPAR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80.096.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		80.096.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bandung	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5%	3.278.772.636	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bandung	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	5%	3.278.772.636
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Borang Kebudayaan yang terkelola	3 Objek	2.353.767.350	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Borang Kebudayaan yang terkelola	3 Objek	2.353.767.350
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	2.353.767.350	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	2.353.767.350,00

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan	2 Jenis	925.005.286	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan	2 Jenis	925.005.286
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	166.055.586	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	166.055.586
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	758.949.700	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	758.949.700
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 Orang		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Orang	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Adat yang di Bina	0 Lembaga	188.805.300	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Adat yang di Bina	0 Lembaga	188.805.300
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kabupaten Bandung	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	5%		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kabupaten Bandung	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina	5%	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lingkung Seni yang aktif	50 Lingkung Seni		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lingkung Seni yang aktif	50 Lingkung Seni	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	23.205.300	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	23.205.300
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Orang	165.600.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Orang	165.600.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kabupaten Bandung	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	1%	19.521.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kabupaten Bandung	Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara	1%	19.521.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sejarah Lokal yang terkelola	1 Sejarah	19.521.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sejarah Lokal yang terkelola	1 Sejarah	19.521.000
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang Diberdayakan	50 Orang		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang Diberdayakan	0 Orang	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	
Pembinaan Sejarah	Kabupaten Bandung				Pembinaan Sejarah	Kabupaten Bandung			
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kabupaten Bandung	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	5%	584.924.300	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kabupaten Bandung	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	5%	584.924.300
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	5%	192.320.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan	5%	192.320.000
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7 Cagar Budaya		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7 Cagar Budaya	
Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		192.320.000	Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 objek	192.320.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	8 Cagar Budaya		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	8 Cagar Budaya	
Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 cagar Budaya	392.604.300	Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Bandung	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	15 cagar Budaya	392.604.300
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kabupaten Bandung	Prosentase museum yang dikelola	1 Museum	100.650.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kabupaten Bandung	Prosentase museum yang dikelola	0 Museum	100.650.000
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Terbangunnya museum sejarah Daerah	1 Museum		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Terbangunnya museum sejarah Daerah	0 Museum	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kabupaten Bandung	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kabupaten Bandung	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 paket	100.650.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 paket	100.650.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa Wisata yang ditata	3 Desa	3.353.926.100	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten Bandung	Jumlah Desa Wisata yang ditata	3 Desa	3.393.926.100
		Jumlah Destinasi Wisata Baru	1 Destinasi Wisata				Jumlah Destinasi Wisata Baru	1 Destinasi Wisata	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Prosentase Daya Tarik Wisata yang dikelola	1%		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Prosentase Daya Tarik Wisata yang dikelola	0%	
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Lokasi		Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Lokasi	
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	50 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	0 Orang	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Kawasan strategis pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	30%		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Kawasan strategis pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	30%	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Unit		Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Orang	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	103.680.400	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	103.680.400
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1%		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola	1%	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	0 Dokumen		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	1 Dokumen	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	0 Dokumen		Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	0 Dokumen	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Destinasi		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Destinasi	
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	1.606.857.900	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	1.606.857.900
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 laporan		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 laporan	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.279.308.300	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.319.308.300,00

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	103.680.400	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	103.680.400
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani	100%	364.079.500	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani	100%	364.079.500
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen		Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	0 Dokumen	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kabupaten Bandung	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	0 Industri		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Kabupaten Bandung	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	0 Industri	
Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0 Laporan		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	0 Laporan	
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	0 Usaha	71.509.500	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	20 Usaha	71.509.500

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	0 Usaha		Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	0 Usaha	
Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	0 Usaha		Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	0 Usaha	
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	0 Usaha		Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	20 Usaha	
Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Usaha		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Usaha	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	0 Usaha	3.108.269.800	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kabupaten Bandung	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung	0 Usaha	3.108.269.800
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	2 kegiatan	3.108.269.800	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online	2 kegiatan	3.108.269.800

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 laporan	1.784.078.600	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 laporan	1.784.078.600
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	227.494.700	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	227.494.700
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	549.126.500	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	549.126.500
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	147.570.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	147.570.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kabupaten Bandung	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	1%	705.099.400	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kabupaten Bandung	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI	1%	705.099.400

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah creative Hub yang terbentuk	2 Hub		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah creative Hub yang terbentuk	2 Hub	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1 Unit	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	2 Komunitas		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf	2 Komunitas	
Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen		Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen	
Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Bandung	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen		Pengembangan Pendidikan	Kabupaten Bandung	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0 Dokumen	
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	196.750.000	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Kabupaten Bandung	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	196.750.000,00
Penyediaan Infrastruktur	Kabupaten Bandung	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0 Unit		Penyediaan Infrastruktur	Kabupaten Bandung	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0 Unit	
Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		Pengembangan Sistem Pemasaran	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	0 Dokumen		Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	0 Dokumen	
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi		Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	0 Dokumen	
Fasilitasi pemberian insentif	Kabupaten Bandung	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 Orang		Fasilitasi pemberian insentif	Kabupaten Bandung	Jumlah Insentif yang Diberikan	0 Orang	
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Kabupaten Bandung	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	0 Pelaku usaha		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Kabupaten Bandung	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	0 Pelaku usaha	
Penyusunan Skema Insentif Daerah	Kabupaten Bandung	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	0 Dkumen		Penyusunan Skema Insentif Daerah	Kabupaten Bandung	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	0 Dkumen	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0 Orang		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	0 Orang	
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Produk		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kabupaten Bandung	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Produk	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Perlindungan Hasil Kreativitas	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		Perlindungan Hasil Kreativitas	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0 Dokumen	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0 Lembaga		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Kabupaten Bandung	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Bandung	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	5%	1.718.784.500	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kabupaten Bandung	Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina	5%	1.678.784.500
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Bandung	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	500 Orang	1.234.289.900	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kabupaten Bandung	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan	500 Orang	1.234.289.900

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	200 Orang		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	0 Orang	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	595.140.500	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Orang	595.140.500
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	417.309.400	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	377.309.400,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	221.840.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	221.840.000,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 laporan		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 laporan	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	5%	484.494.600	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf	5%	484.494.600
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100 Peserta		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Peserta	
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	200 Orang	
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	0 Lembaga	484.494.600	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	0 Lembaga	484.494.600

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANWAL RKPD	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RANHIR RKPD
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang		Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang	
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang		Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang	

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

II.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Telaahan Terhadap Usulan Musrenbang

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui pengukuran indikator makro pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

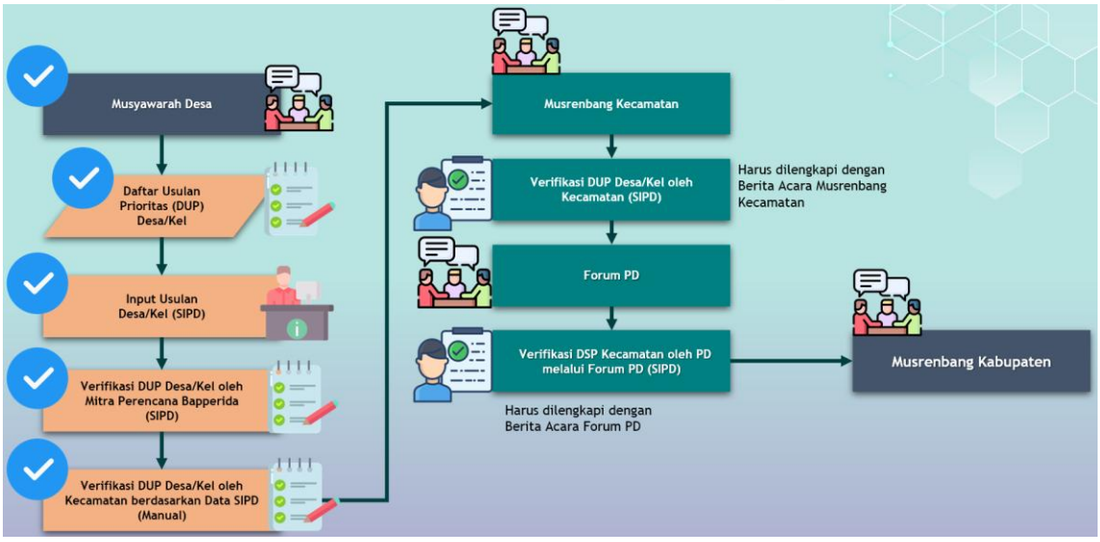
Dalam konteks rencana kerjanya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dituntut tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mampu menggali potensi lokal, menjawab berbagai tantangan aktual, serta merumuskan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kebudayaan. Kebutuhan untuk menyusun program kerja yang relevan, partisipatif, dan berdampak langsung menjadi semakin mendesak di era keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang tinggi.

Sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap usulan program dan kegiatan yang masuk melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Telaahan dilakukan untuk mengukur tingkat urgensi, relevansi, dan kesesuaian usulan dengan arah pembangunan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, RPJMD, dan RKPD.

Selain itu, proses telaahan juga dimaksudkan untuk menyaring dan memprioritaskan usulan masyarakat yang memiliki potensi memberikan dampak besar terhadap pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas seni, pelindungan warisan budaya, dan peningkatan literasi budaya masyarakat. Kajian ini mencakup usulan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, komunitas seni dan budaya, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, hingga kelompok pemuda dan pelajar yang peduli terhadap isu-isu kebudayaan lokal.

Usulan-usulan tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi lapangan, dialog tematik, serta penelusuran data oleh tim teknis Dinas Kebudayaan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan riil di berbagai wilayah. Berikut ini disajikan alur usulan Musrenbang Kecamatan yang menjadi dasar dalam perumusan kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025:

Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Bandung secara konsisten melaksanakan proses perencanaan yang transparan dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dari berbagai lapisan.

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap aspirasi kultural masyarakat, Musrenbang memiliki peran strategis dalam memperkuat relevansi program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sektor kebudayaan benar-benar bersumber dari akar persoalan dan potensi budaya lokal.

Melalui forum ini, berbagai masukan, usulan, dan gagasan dari komunitas budaya, tokoh masyarakat, lembaga adat, pelaku seni, serta organisasi kemasyarakatan dihimpun dan dikaji. Usulan tersebut kemudian diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan strategis daerah serta Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, agar pelaksanaan program kebudayaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak langsung terhadap pelestarian, pemberdayaan, dan pemajuan budaya lokal.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tahun perencanaan 2024 (untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2025), telah dihimpun sejumlah usulan program dan kegiatan yang diarahkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung. Usulan-usulan tersebut telah melalui proses telaah teknis berdasarkan kriteria kelayakan, urgensi, dan kesesuaian dengan prioritas program dinas, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2025. Adapun daftar usulan hasil Musrenbang yang masuk kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025

USULAN	KECAMATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	VOL	SATUAN
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Cikancung	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Cikancung	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Soreang	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Pameungpeuk	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Margahayu	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Pacet	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Margaasih	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Cangkuang	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Paseh	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Cimenyan	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN
#MS Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional	Pacet	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	PAGELARAN

USULAN	KECAMATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	VOL	SATUAN
			dalam Daerah Kabupaten/Kota			
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Nagreg	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Rancaekek	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET
#MS Bantuan Alat Kesenian Benjang / Reak	Cilengkrang	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Nagreg	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET
#MS Bantuan Alat Kesenian Pencak Silat	Cikancung	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	SET

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menempatkan sektor kebudayaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkepribadian, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam dokumen tersebut, pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga pada penguatan identitas nasional, peningkatan peran budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta pelindungan terhadap warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Fokus utama arah kebijakan nasional di bidang kebudayaan meliputi: (1) pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal; (2) penguatan kelembagaan budaya termasuk revitalisasi taman budaya, museum, dan pusat seni; (3) pengarusutamaan budaya dalam pembangunan lintas sektor; serta (4) fasilitasi dan pendampingan komunitas budaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya. Pemerintah pusat juga mendorong penciptaan ekosistem budaya yang inklusif melalui kebijakan afirmatif terhadap komunitas adat dan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas SDM kebudayaan.

Salah satu strategi utama dalam kebijakan nasional adalah pelaksanaan Strategi Pemajuan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Strategi ini mencakup penguatan data pokok kebudayaan melalui pemutakhiran secara nasional, fasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta sinergi program antara pusat dan daerah untuk mendorong keberlanjutan kebudayaan sebagai sumber kekuatan pembangunan nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), revitalisasi bahasa daerah, dan pengembangan pendidikan budaya di semua jenjang pendidikan.

Transformasi digital juga menjadi prioritas nasional dalam kebijakan kebudayaan, yang mencakup digitalisasi arsip budaya, penyebaran konten budaya melalui platform daring, serta integrasi sistem informasi budaya nasional dan daerah. Selain itu, kebijakan nasional mendorong pelaksanaan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan budaya global.

Dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan dapat menyelaraskan program-programnya, baik dalam bentuk pelindungan warisan budaya, penguatan identitas budaya lokal, pemberdayaan komunitas seni,

maupun penciptaan ruang-ruang ekspresi budaya. Dukungan pusat, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, pelatihan SDM, maupun fasilitasi kelembagaan, merupakan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bandung.

2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, sektor kebudayaan ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan kerakyatan yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Meski fokus utama dokumen ini lebih menyasar pembangunan ekonomi, kebudayaan tetap memperoleh porsi signifikan, terutama terkait pengarusutamaan nilai budaya dalam pengembangan destinasi dan komunitas.

Provinsi Jawa Barat secara eksplisit mengedepankan penguatan nilai budaya daerah melalui program revitalisasi kesenian tradisional, pengembangan museum dan museum budaya, serta pendokumentasian dan perlindungan terhadap warisan budaya, mencerminkan komitmen dalam Program Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Langkah ini sejalan dengan upaya daerah dalam memperkuat identitas budaya dan meningkatkan apresiasi publik terhadap budaya lokal.

Strategi pengembangan kebudayaan provinsi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta, sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif. Peningkatan kapasitas SDM kebudayaan, digitalisasi arsip dan data budaya, serta fasilitasi pendaftaran HAKI dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi bagian dari kebijakan strategis. Hal ini selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong transformasi digital dan perlindungan budaya berbasis hukum.

Dengan arahan provinsi tersebut, Kabupaten Bandung memiliki peluang besar untuk menyelaraskan program kebudayaan lokal seperti revitalisasi kesenian tradisional, penguatan fasilitas budaya (taman budaya, balai kesenian), digitalisasi museum, serta dukungan terhadap komunitas budaya dan KIK lokal sehingga dapat berkontribusi langsung pada target pembangunan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini membuka ruang sinergi dan akses pendanaan program kebudayaan yang lebih luas dan berdaya guna bagi masyarakat.

3. Telaahan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029

Kebijakan urusan kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat identitas dan karakter masyarakat lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Isu strategis terkait pemajuan kebudayaan telah menjadi bagian penting dalam rumusan misi pembangunan daerah, khususnya dalam

mendorong pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, pelestarian warisan budaya, serta penguatan ketahanan sosial melalui revitalisasi nilai-nilai budaya Sunda.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah baru hasil pemekaran, memiliki tanggung jawab strategis dalam mengarusutamakan kebudayaan ke dalam setiap aspek pembangunan. Dalam dokumen RPJMD, kebijakan pembangunan kebudayaan secara eksplisit dijabarkan melalui sasaran strategis pembangunan daerah, seperti meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan, terwujudnya pelestarian cagar budaya dan tradisi lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya.

Program-program utama yang diamanatkan dalam RPJMD mencakup:

a. Program Pelestarian Warisan Budaya Daerah, dengan fokus pada pendataan, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya serta ekspresi budaya tak benda.
b. Program Revitalisasi Kesenian Tradisional, melalui pembinaan komunitas seni dan pelaksanaan event budaya daerah secara berkelanjutan.
c. Program Peningkatan Literasi dan Edukasi Budaya, termasuk integrasi muatan lokal dalam pendidikan dan pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, kebijakan pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, serta mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan kebudayaan ditempatkan secara strategis dalam upaya membentuk jati diri daerah, memperkuat solidaritas sosial, serta sebagai sarana edukatif dan ekspresi masyarakat lintas generasi.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung secara langsung berkontribusi terhadap Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.” Dalam kerangka ini, peran kebudayaan bukan hanya sebagai pelestarian seni dan adat istiadat, tetapi juga sebagai sarana edukasi karakter, penguatan identitas, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan komunitas adat.

Kebijakan ini dilengkapi dengan strategi pembangunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri dari tujuh dimensi: ekonomi budaya, ketahanan sosial-budaya, warisan budaya, bahasa, kesenian, literasi, dan budaya politik. Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan peningkatan IPK melalui kegiatan pelestarian budaya yang inklusif, terukur, dan berbasis masyarakat.

Lebih lanjut, Dinas Kebudayaan diarahkan untuk membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan komunitas anak dalam mendesain program budaya yang mendidik,

mencerahkan, serta memberdayakan. Kebijakan ini selaras dengan pendekatan pembangunan SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, toleran, dan cinta budaya lokal.

Dengan landasan tersebut, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan misi dan arah kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang konkret, berdampak, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbudaya dan berdaya saing

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta menindaklanjuti arah kebijakan strategis nasional dan Provinsi Jawa Barat di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjabarkan visi dan misi daerah ke dalam agenda operasional kebudayaan yang sinkron dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Rencana kerja ini mengakomodasi berbagai isu strategis daerah, termasuk lemahnya dokumentasi dan pelindungan warisan budaya, rendahnya literasi budaya generasi muda, keterbatasan SDM kebudayaan, serta masih terbatasnya ruang ekspresi budaya di masyarakat. Selain itu, rencana kerja ini juga memanfaatkan potensi budaya lokal yang kaya, seperti seni tradisional, adat istiadat, bahasa daerah, dan ekspresi budaya takbenda lainnya yang berkembang di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang penguatan karakter, pendidikan budaya, dan pemberdayaan komunitas seni dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan misi daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, berkarakter, serta berwawasan budaya lokal yang kuat. Dinas Kebudayaan juga menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan: Terwujudnya Berkebudayaan Maju

Tujuan ini mengarah pada upaya membangun kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung yang berbudaya, berkarakter, dan menjadikan kebudayaan sebagai landasan utama pembangunan daerah. Berkebudayaan maju berarti terciptanya ekosistem budaya yang hidup, produktif, dan inklusif, di mana nilai-nilai budaya Sunda mampu tumbuh dan berkembang selaras dengan tantangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa kuat budaya lokal menjadi

identitas, sumber inspirasi, serta kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya ini meliputi pelestarian warisan budaya, pengembangan ekspresi seni kontemporer yang berakar pada tradisi, serta pemanfaatan budaya sebagai sumber pembelajaran, penguatan karakter, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kebudayaan mendorong agar kebudayaan tidak sekadar menjadi ornamen seremoni, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari—dalam pendidikan, tata kelola komunitas, pengembangan desa budaya, hingga kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dengan terwujudnya berkebudayaan maju, Kabupaten Bandung dapat menjadi daerah yang kuat dalam identitas, berdaya dalam inovasi, dan harmonis dalam keberagaman.

Sasaran: Meningkatkan Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda terhadap Pembangunan Daerah

Sasaran ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan ekspresi budaya Sunda tidak hanya bertahan di tengah arus globalisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ketahanan budaya mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan, melestarikan, dan mewariskan kebudayaan lokal dari generasi ke generasi. Sementara kontribusi budaya mengacu pada peran budaya dalam membentuk perilaku sosial yang positif, mendukung sektor ekonomi kreatif, serta memperkuat jati diri daerah di tengah dinamika pembangunan.

pencapaian sasaran ini mencakup meningkatnya dokumentasi dan pelindungan warisan budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian tradisi lokal, hingga penguatan kelembagaan komunitas budaya di tingkat desa. Dengan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mengaktifkan budaya sebagai kekuatan pembangunan yang dinamis dan transformatif.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan DInas Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2025	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN 2025
Terwujudnya Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan Makan, Minum	56,27 Poin	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya sunda terhadap pembangunan daerah	Presentase Pemajuan Kebudayaan	45 %

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

Dalam proses perencanaan strategis pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja merupakan komponen penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara terarah dan terukur. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur kuantitatif semata, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan prioritas program, pengalokasian sumber daya, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung wajib memiliki indikator yang selaras dengan arah kebijakan strategis daerah, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta dapat dinilai secara objektif.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam memperkuat karakter daerah, membentuk identitas kultural masyarakat, serta mendorong budaya sebagai pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, perumusan indikator kinerja disusun dengan mempertimbangkan tantangan aktual di sektor kebudayaan, potensi lokal, serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat.

Tujuan utama yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Berkebudayaan Maju”, yang mencerminkan cita-cita Kabupaten Bandung untuk membangun kehidupan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai budaya, berkarakter kuat, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, digunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator kinerja utama, dengan target capaian sebesar 56,27 poin pada tahun 2025.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan adalah “Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Sunda terhadap pembangunan daerah”. Sasaran ini menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan sosial dan ekonomi, sekaligus sebagai sumber pembentukan karakter masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah presentase pemajuan kebudayaan, dengan target capaian sebesar 45% pada tahun 2025.

Dengan landasan tujuan dan sasaran ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjalankan program dan kegiatan yang lebih terarah, berdampak nyata, serta mendorong transformasi kebudayaan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang diarahkan untuk memperkuat kontribusi kebudayaan dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, beridentitas, dan berdaya saing. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan yang diselaraskan dengan tujuan strategis perangkat daerah serta kebutuhan riil masyarakat.

Proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis, berbasis pada analisis terhadap isu-isu strategis daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta kajian terhadap kebijakan nasional dan provinsi di sektor kebudayaan. Pendekatan partisipatif dan responsif turut digunakan dalam menyusun setiap intervensi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial budaya dan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan juga dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

III.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memperoleh hasil yang terukur dan relevan dengan tugas serta fungsi perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mencapai sasaran tertentu dan menjadi bagian dari solusi atas isu strategis yang dihadapi daerah. Dalam kerangka pembangunan kebudayaan, program-program yang disusun tidak hanya berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan budaya sebagai sumber daya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dan partisipatif, di mana komunitas budaya, lembaga pendidikan, seniman lokal, serta masyarakat umum menjadi bagian aktif dari pelaksanaan program. Dengan pelibatan multipihak ini, diharapkan pembangunan kebudayaan tidak hanya berdampak pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga mampu menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan kontribusi budaya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal Dinas Kebudayaan melalui penguatan sistem birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan manajemen risiko perangkat daerah. Fokus program ini adalah membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan transparan guna mendukung pelaksanaan urusan kebudayaan secara lebih efektif dan efisien. Indikator utamanya adalah meningkatnya skor Indeks Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dari tahun ke tahun

2. Program Pengembangan Kebudayaan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Kegiatannya mencakup fasilitasi komunitas budaya, pelatihan dan workshop kesenian, penguatan desa budaya, hingga pelaksanaan event budaya berbasis lokal. Target program ini adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini fokus pada pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan kesenian tradisional Sunda. Bentuk kegiatannya mencakup inventarisasi kesenian, pembinaan kelompok seni tradisi, festival budaya, dan fasilitasi ruang pertunjukan rakyat. Output yang diharapkan adalah peningkatan prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

4. Program Pembinaan Sejarah

Program ini fokus pada pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan kesenian tradisional Sunda. Bentuk kegiatannya mencakup inventarisasi kesenian, pembinaan kelompok seni tradisi, festival budaya, dan fasilitasi ruang pertunjukan rakyat. Output yang diharapkan adalah peningkatan prosentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dirancang untuk melindungi dan mengelola cagar budaya serta warisan budaya takbenda secara berkelanjutan. Kegiatan mencakup identifikasi dan pendataan, registrasi cagar budaya, penyusunan dokumen pelindungan, serta konservasi fisik dan non-fisik.

6. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola museum sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya. Kegiatan utama mencakup revitalisasi museum daerah, peningkatan koleksi dan narasi sejarah, penyelenggaraan pameran tematik, serta promosi kunjungan museum. Dinas Kebudayaan menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan ke museum sebagai indikator efektivitas pengelolaan program ini.

Rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan turunan dari dokumen Renstra dan telah diselaraskan dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Seluruh kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisis isu strategis sektoral, serta masukan dari forum Musrenbang dan perangkat daerah. Kegiatan tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada aspek penguatan nilai, edukasi, partisipasi publik, dan pemberdayaan komunitas budaya.

Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
DINAS KEBUDAYAAN				8.864.370.419					0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.864.370.419					0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				8.864.370.419					0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP		81,95 Poin						0
	Persentase Aset dalam kondisi baik		93,25%	4.707.879.083					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	20.272.180					0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000	Penghematan Belanja				0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.272.180	Penghematan Belanja				0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Penghematan Belanja				0
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Data	-	Penghematan Belanja				0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.702.677.763					0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bulan	3.702.157.943	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)				0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	519.820	Penghematan Belanja				0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	-	Penghematan Belanja				0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Miilik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	4.500.000					0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000	Penghematan Belanja				0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.500.000	Penghematan Belanja				0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	5.200.000					0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.200.000	Penghematan Belanja				0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	-					0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	-	Penghematan Belanja				0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	Penghematan Belanja				0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	63.147.175					0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.000.000	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	12.354.400	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.500.000	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.500.000	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	11.503.500	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.500.000	Penghematan Belanja				0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000	Penghematan Belanja				0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	24.789.275	Penghematan Belanja				0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	78.176.401					0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Penghematan Belanja				0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	18.160.001	Penghematan Belanja				0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	55.046.400	Penghematan Belanja				0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.970.000	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	800.905.564					0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	8.316.000	Penghematan Belanja				0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	792.589.564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	23.000.000					0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	20.550.000	Penghematan Belanja				0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.450.000	Penghematan Belanja				0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	-	Penghematan Belanja				0
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	10.000.000					0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi,		19%	3.428.472.336					0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
	pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)								
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		4 Objek	2.109.267.050					0
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Objek	2.109.267.050	Penghematan Belanja				0
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan		2 Jenis	1.319.205.286					0
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	157.055.586	Penghematan Belanja				0
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	1.162.149.700	Penghematan Belanja				0
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Borang Kesenian yang tersertifikat dan dibina		5%	165.600.000					0
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkung Seni yang aktif		2 Jenis	165.600.000					0
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	-	-				0
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Sertifikat	165.600.000	Penghematan Belanja				0
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Kabupaten Bandung yang terpelihara		5%	-					0
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang terkelola		1 Sejarah	-					0
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	-	Penghematan Belanja				0
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan		15%	562.419.000					0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
		LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
							TOLOK UKUR	TARGET	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bandung yang akan ditetapkan		15%	169.814.700					0
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Objek	169.814.700	Penghematan Belanja				0
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		20 Objek	392.604.300					0
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Objek	392.604.300	Penghematan Belanja				0
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola		1 Museum	-					0
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terbangunnya museum sejarah daerah		1 Museum	-					0
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	-	Penghematan Belanja				0

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)
DINAS KEBUDAYAAN			8.864.370.419
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.864.370.419
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.864.370.419
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.707.879.083
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.272.180
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.702.157.943
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	519.820

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.354.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.503.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.789.275
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.160.001
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.046.400
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.970.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	8.316.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	792.589.564
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	20.550.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.450.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	10.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	3.428.472.336
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	2.109.267.050
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	157.055.586
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	9 Laporan	1.162.149.700
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	16.560.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	-
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	165.600.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	-
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	562.419.000
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	169.814.700
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	20 Objek	392.604.300
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	-

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (RP.)
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	-

Sumber : Hasil Analisis Disbud, 2025

BAB V
PENUTUP

V.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas, nilai, dan ketahanan budaya daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dilakukan berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual kebudayaan, potensi seni tradisi dan warisan budaya, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Seluruh program dan kegiatan yang dirancang merupakan hasil dari identifikasi isu strategis kebudayaan, kebutuhan riil masyarakat adat dan komunitas budaya, serta tantangan sektoral seperti minimnya regenerasi pelaku budaya, pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal, dan lemahnya ekosistem kelembagaan budaya. Penyusunan Renja ini juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor serta sinergi antarlevel pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

V.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung diarahkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan disusun secara terukur, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan berbasis hasil (*result-based planning*).

Pelaksanaan program kebudayaan juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kolaborasi dengan komunitas budaya, seniman, budayawan, lembaga adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi pendekatan utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berdaya saing.

Penguatan kelembagaan budaya, penyesuaian struktur organisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis kebudayaan dan pengelola pusat kegiatan budaya, merupakan elemen kunci dalam mendukung implementasi program yang optimal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumentasi budaya menjadi instrumen penting dalam memperluas akses, memperkuat promosi warisan budaya, serta mempercepat transformasi digital sektor kebudayaan.

V.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin konsistensi implementasi Perubahan Renja tahun 2025, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut yang mencakup:

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal guna menyinergikan pelaksanaan program kebudayaan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga adat, komunitas budaya, akademisi, dan pemerintah desa;
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) guna mengukur capaian output dan outcome secara objektif, khususnya dalam aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya;
3. Pengembangan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan program kebudayaan;
4. Pemetaan potensi dan peluang pendanaan alternatif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, mitra swasta, CSR, dan lembaga filantropi budaya untuk mendukung pembiayaan kegiatan strategis;
5. Penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah agar pelaksanaan program kebudayaan tetap adaptif terhadap perubahan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pelaksanaan yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kolaborasi multipihak yang sinergis, diharapkan pembangunan sektor kebudayaan Kabupaten Bandung mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan jati diri daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya, serta ketahanan sosial yang berakar pada kearifan lokal.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjadikan tahun 2025 sebagai momentum penguatan ekosistem kebudayaan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan program-program strategis yang adaptif terhadap dinamika zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari hadirnya kebijakan kebudayaan yang progresif dan inklusif.

Ke depan, Dinas Kebudayaan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Bandung, cita-cita mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, serta bangga akan identitas dan warisan budayanya, akan semakin mendekati kenyataan.

Demikian dokumen ini kami susun, kami berharap dokumen perubahan renja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Soreang,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd

IRVAN AHMAD

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA